

Populisme Nasionalis Sebagai Faktor Pengaruh Perubahan Kebijakan Denmark Mengenai Restriksi Pengungsi 2012-2015

Bayu Herlambang Putra

Departemen Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
Email: bayu.herlambangp@gmail.com

Abstract

This study departs from the policy changes made by Denmark on the admission of refugees. This study is problematic because Denmark as a signatory to the 1951 convention on refugees are required to assist the refugee crisis in Europe, but Denmark change the policy began in 2012 by becoming more restrictive towards refugees. Through analysis of populism and nationalism, this paper argues that the change in policy from receiving to the restriction of refugees by the Danish influenced by the ideology of populism coming from right-wing parties via Dans Folke Party (DPP) which carries the values of Danish nationalism.

Keywords: Denmark, Refugees, Dans Folke Parti (DPP), Political Ideology, Populism, Nasionalism

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Denmark terhadap penerimaan pengungsi ke Denmark. Penelitian ini menjadi problematik dikarenakan Denmark sebagai negara yang ikut menandatangani konvensi 1951 tentang pengungsi diharuskan untuk membantu krisis pengungsi di Eropa, akan tetapi Denmark merubah kebijakan dimulai pada tahun 2012 menjadi lebih restriktif terhadap pengungsi. Melalui telaah populisme dan nasionalis tulsian ini memiliki tesis bahwa perubahan kebijakan dari menerima menuju restriksi oleh Denmark dipengaruhi oleh adanya ideologi populisme yang datang dari partai sayap kanan melalui Dans Folke Parti (DPP) yang membawa nilai-nilai Danish nasionalisme.

Kata Kunci: Denmark, Pengungsi, Dans Folke Parti (DPP), Ideologi Politik, Populisme, Nasionalisme

Pendahuluan

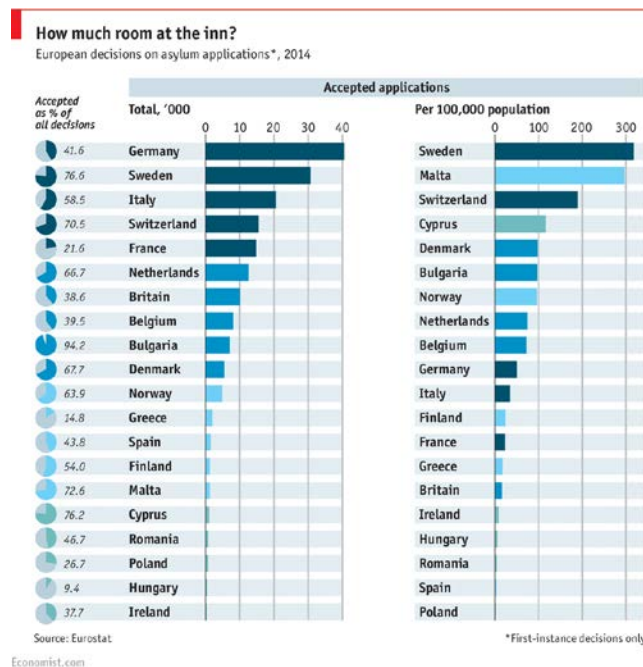
Denmark merupakan salah satu negara yang aktif menerima pengungsi sejak keputusannya menandatangani Konvensi 1951 pada tahun 1952. Menurut data newtodenmark (2015), sejak tahun 1978, Denmark telah bekerjasama dengan staf United Nations High Commisioner for Refugees (UNHCR) dalam menentukan kuota tetap untuk pengungsi yang ingin datang ke Denmark yakni sebanyak 500 hingga 1.500 orang. Bahkan, data juga menunjukkan bahwa Denmark merupakan negara yang

menerima seperlima total pengungsi di Uni Eropa, lebih banyak daripada Jerman (newtodenmark, 2015). Menurut data UNHCR (2015) juga disebutkan bahwa hingga tahun 2013, Denmark merupakan negara yang berkontribusi cukup signifikan dalam misi penerimaan pengungsi di Eropa. Setidaknya 86 juta US Dolar telah diberikan Denmark pada UNHCR, selain itu Denmark juga telah menerima 26.807 pengungsi. Data-data tersebut menunjukkan bahwa sampai tahun 2013, Denmark berpartisipasi aktif dalam penerimaan pengungsi. (lihat grafik 1.1).

Namun, pada bulan Agustus 2015, Denmark merilis petisi kontroversial berbahasa Arab di surat kabar milik Lebanon yang menegaskan bahwa terdapat pembatasan pengungsi yang berasal dari Timur Tengah, kebijakan ini menunjukkan adanya perubahan orientasi kebijakan terkait pengungsi. (Lihat grafik I.1). Pergeseran posisi partai berkuasa dalam koalisi pemerintahan

disebut sebagai salah satu alasan dari posisi keras terhadap pengungsi yang diberlakukan Denmark. Sejak bulan Juni 2015, partai Social-Democrat yang biasanya berkuasa di parlemen digantikan dengan koalisi partai-partai sayap kanan seperti Venstre, Danish People's Party, Liberal Alliance, Conservative People's Party dan Christian Democrat (BBC News, 2015).

Grafik 1: Jumlah Aplikasi Suaka dari Pengungsi di Negara-Negara Eropa 2014; Denmark menempati posisi negara peringkat lima terbanyak yang menerima aplikasi pengungsi di negaranya



Sumber: Eurostat, 2014

Sebagai langkah nyata dari lanjutan petisi tersebut, pada Desember 2015 pemerintah Denmark mempertimbangkan dan mengkaji ulang penerimaan pengungsi dengan mengajukan proposal amandemen terhadap Alien Act dalam Law No. 87 yang secara keseluruhan mengajukan berisi pembatasan terhadap masuknya pengungsi dengan memberikan koridor kecil bagi mereka untuk mengajukan pencarian suaka. Dalam hal ini pengungsi yang akan mengajukan aplikasi suaka ke Denmark persyaratannya telah dipersulit sejak tahun 2015. Hal ini merupakan hasil dari adanya amandemen ini, implikasinya kemudian, Denmark diawasi langsung

oleh UNHCR melalui “UNHCR Observations on the Proposed Amendments to the Danish Alien Legislation, L.87” yang menyatakan penyesalan terhadap pemberlakuan aturan yang justru tidak menunjukkan aksi solidaritas internasional terhadap keberadaan pengungsi.

The proposals presented by the Government are evidently aimed at conveying a message to make it “less attractive” to seek asylum in Denmark, and is a deeply concerning response to humanitarian needs. UNHCR regrets that Denmark is restricting its asylum legislation for the sole purpose of curbing the number of asylum-seekers, instead of focusing on promoting and supporting a fair distribution of asylum-seekers within all EU Member States (UNHCR, 2015: 1).

The signal Denmark's introduction of restrictions sends to other countries in the world, including the major refugee hosting countries and European countries that need to strengthen their asylum and integration capacity in order to receive higher numbers of refugees, is worrisome and could fuel fear, xenophobia and similar restrictions that would reduce – rather than expand - the asylum space globally and put refugees in need at life threatening risks (UNHCR, 2015: 2).

Hasil observasi UNHCR yang menunjukkan keberatan dan beberapa rekomendasi bagi pemerintah Denmark untuk bersikap inklusif terhadap pengungsi dijawab dengan respon negative ketika pada 26 Januari 2016 melalui ratifikasi amandemen Law No. 87 on Amending the Aliens Act terdapat penyempurnaan dan tambahan poin dalam Asylum Packett yang dirilis pada 13 November 2015 lalu. Adapun salah satu dari beberapa poin yang tercantum pada undang-undang tersebut dan berdampak bagi menurunnya kedatangan pengungsi ke Denmark ialah pengurangan 10 persen bantuan dana terhadap pengungsi. Selain itu, melalui Law No. 1723, mereka yang berupaya untuk masuk ke Denmark di perbatasan dan tidak membawa kartu identitas lengkap ditolak oleh otoritas berwenang dan wajib untuk ditahan sampai waktu deportasi. Hukum ini juga memungkinkan penahanan selama 72 jam tanpa tersedianya surat penahanan dari pengadilan bagi pengungsi tersebut (Library of Congress, 2016). Sejak akhir tahun 2015, Denmark juga menerapkan kebijakan untuk mengambil aset pengungsi ketika memasuki perbatasan negara tersebut. Setidaknya barang-barang tidak berharga milik pengungsi yang masuk ke Denmark harus diberikan hingga jumlah sebesar \$1.500 terpenuhi (Foreign Policy, 2016). Kebijakan pengungsi yang dilakukan oleh Denmark merupakan ilustrasi dari arah kebijakan luar negeri yang diberlakukannya kemudian. Lam (2013) mengutip buku International Factors in the Formation of Refugee Movements, bahwa sejak tahun 1980, pemberlakuan kebijakan migrasi di beberapa negara digunakan oleh pemerintah bersangkutan sebagai alat dari kebijakan luar negeri. Negara yang

menerima pengungsi dapat dilihat atraktif, atau bahkan menjadi kurang menarik ketika kebijakan terhadap pengungsi dijalankan dengan tidak efektif oleh negara tersebut. Hal ini sejalan dengan resultan yang terjadi dalam pemberlakuan kebijakan luar negeri, utamanya dalam regulasi Uni Eropa melalui council Justice and Home Affairs (JHA). Dalam Recommendation of the Council of May 2016, pemberlakuan Temporary Reintroduction of Border Control, dapat diartikan bahwa anggota EU meyakini adanya ancaman terhadap kebijakan publik maupun keamanan perbatasan, lalu diambillah langkah ini yang sudah seharusnya dilakukan dalam waktu yang terbatas dan seminimum mungkin, hal ini dilakukan Denmark sejak Januari 2016 kembali diperpanjang dimulai pada Juni – November 2016 (European Commission, 2016). Akibat dari pemberlakuan hukum baru di Denmark ini, jumlah pengungsi yang datang ke Denmark menurun secara tajam yakni dari 100 orang per hari menjadi hanya 11 orang per hari saja (dr.dk, 2016).

Nasionalisme-Populisme sebagai Pendorong Kebijakan Proteksionis Terhadap Pengungsi

Untuk menganalisis perubahan kebijakan pengungsi Denmark penulis menggunakan sintesis nasionalisme dan populisme dalam perpolitikan domestik. Sintesis kedua pandangan ini yaitu nasionalis-populisme menjadi katalis bagi perubahan kebijakan tersebut. Pemahaman mengenai nasionalisme menjadi populer dari salah satu pernyataan Benedict Anderson yakni imagined community yang berdasarkan pada konstruksi sosial terkait kebangsaan mereka (Anderson, 1991). Nasionalisme sendiri dapat dibagi menjadi dua yakni ethnic nationalism dan civic nationalism, apabila ethnic nationalism dipahami sebagai nasionalisme yang hadir akibat kesamaan etnis, civic nationalism dapat terbentuk ketika etnis-etnis berbeda di dalam suatu negara telah mencapai nasionalisme dalam bentuk

kewarganegaraan (Wardhani, 2012). Dalam konteks kontemporer, nasionalisme menjadi salah satu konsep yang relevan bagi negara untuk memformulasikan identitas mereka dalam pembentukan kebijakan domestik dan luar negeri, salah satu contohnya ialah dalam hal imigrasi (Bauder, 2011). Pemahaman mengenai nasionalisme yang merujuk permasalahan kebijakan proteksionis Denmark ialah pernyataan Gellner (dalam Petocs, 2009: 20) yakni a political doctrine which holds that the political and national should be congruent. Jonathan Hearn (dalam Petocs, 2009: 20) memaknai bahwa nasionalisme merupakan kombinasi dari pemahaman prinsip populasi terkait identitas, yurisdiksi dan teritori. Nasionalisme dapat hadir ketika ketiga prekondisi tersebut dilihat aktual untuk mengalami gesekan dengan suatu isu. Upaya nasionalisme ialah mengartikulasikan identitas dalam kebijakan yang nyata. Hal inilah yang kemudian menjadi katalis tersendiri bagi pengaruh populisme dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Terdapat perbedaan khas dari nasionalisme apabila disandingkan dengan konsep populisme. Nasionalisme tidak membutuhkan situasi yang berlawanan antara elit dan masyarakat atau anti-elitis (Jorgensen, 2015), melainkan nasionalisme melakukan alienasi terhadap bangsa lainnya. Di lain sisi, nasionalisme dan populisme memiliki kesamaan atau benang merah dalam konsep *people* yang dimilikinya. Masyarakat dalam nasionalisme dan populisme sama-sama dilihat sebagai suatu kelompok yang memiliki *sense of belonging* terhadap suatu konsep – nasionalisme dengan konsep kebangsaannya dan populisme dengan konsep masyarakat sebagai *silent majority* atau bagian dari *heartland* (Freeden et al, 2013). Namun, nasionalisme lebih terbuka pada kondisi bangsa yang majemuk, misal *civic nationalism* seperti nasionalisme Indonesia, sedangkan populisme mendukung homogenisasi dari masyarakat. Ketergabungan konsep keduanya dipadankan dengan partai

politik sayap kanan yang ada di Eropa yang sama-sama memiliki nilai *nativism* dan *authoritarianism* (Mudde, 2007). Namun, kembali perbedaan mendasar yakni apabila populisme memiliki tesis bahwa elit asli meletakkan kepentingan orang asing di atas masyarakat asli, nasionalisme memiliki tesis bahwa elit asing menguasai masyarakat asli.

Sehingga, hubungan keduanya dapat dikonsepsikan sebagai relasi yang tidak dapat diputus. Hal ini dikarenakan dalam literatur-literatur yang menjelaskan mengenai populisme, ditegaskan bahwa konsep *people* atau masyarakat sebagai konsep utama dari populisme tidak dapat dilepaskan dari konsep *heartland* yang dapat diafiliasikan dengan konsep kebangsaan. Hal ini sesuai dengan anggapan Pantazapolous, salah satu filsuf Yunani, yang menghubungkan populisme dengan nasionalisme dalam hal sebagai alat penentu atau identitas dari *the people* yang dihubungkan dengan kondisi kebangsaan mereka. Dalam diskursus Pantazapolous juga dijelaskan bahwa hubungan keduanya bersifat reduksional sehingga ideologi populis dapat sukses dan berpengaruh terhadap sesuatu hal apabila berbentuk *national-populism* (Panizza, 2005: 245).

National-populism di negara-negara Eropa, lahir dikarenakan efek dari banyaknya pengungsi yang kemudian masuk ke negara-negara Eropa. Hal ini membuat rasa nasionalisme masyarakat Eropa yang tidak ingin kekuasaan atas negaranya berkurang karena kedatangan pengungsi yang kemudian menjadi minoritas. Adanya *national-populism* membuat sistem demokrasi yang telah lama ada di Eropa mulai berkurang, hal ini dikarenakan oleh pembatasan hak-hak yang dimiliki oleh kaum minoritas di Eropa menunjukkan bahwa tujuan dari *national-populism* ini untuk menghancurkan sistem demokrasi di Eropa (Krzeminski, t.t:02). Dalam pertumbuhannya di Eropa *national-populism* didukung oleh adanya implikasi dari tujuan untuk melindungi

kelompok sendiri, bangsa sendiri, dan memberlakukan orang lain sebagai ancaman bagi diri mereka. Sehingga negara-negara Eropa yang menerapkan national-populism membuat mereka menjadi aktor-aktor yang egois (Krzeminski, t.t:02).

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan Denmark yang awalnya menerima pengungsi menjadi lebih kearah proteksionis terhadap pengungsi. Penulis membagi menjadi dua yaitu, interpretasi nilai-nilai dan asumsi Dans Folke Parti(DPP) sebagai elemen populisme dan faktor nasionalisme sebagai elemen-elemen penguat implementasi kebijakan Dans Folke Parti (DPP) di Denmark. di atas, tulisan ini berfokus untuk mengungkap sebab perubahan kebijakan pengungsi Denmark dari terbuka menjadi tertutup(proteksionis) pada tahun 2015.

DANS FOLKE PARTI (DPP) DAN ELEMEN POPULISME DENMARK

Dalam penerapan kebijakan proteksiones pengungsi ini, Denmark sebagai salah satu negara di Eropa yang ikut meratifikasi Konvensi 1951 tentang pencari suaka, mulai mengubah keputusan penerapan kebijakan dari isi ratifikasi tersebut. Berdasarkan hal ini dapat dilihat bahwa nilai dan posisi strategis partai politik Denmark menjadi salah satu faktor perubahan penerapan kebijakan tersebut. Hal ini disebabkan karena partai politik cenderung mementingkan interest elit mereka daripada isi Konvensi 1951 dan suara masyarakat Denmark yang justru berkeinginan untuk membuka pintu lebar kepada para pengungsi. Salah satu partai politik kanan yang cukup penting dalam perpolitikan Denmark dan melambangkan populisme adalah Dans Folke Parti(DPP)

Tokoh-tokoh di dalam DPP berusaha untuk memperlihatkan kepada masyarakat, bahwa tujuan politik Sosial Demokrat yang tidak berpihak pada masyarakat asli Denmark. Dalam ideologi politik sendiri terdapat beberapa

faktor untuk menentukan pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara (Calin, 2010: 14). Faktor-faktor tersebut meliputi alasan ekonomi, dan kekuasaan dalam unit individu, negara maupun dalam lingkup internasional untuk menentukan kebijakan luar negeri. Dalam faktor penentuan kebijakan DPP memandang bahwa, kebijakan yang diterapkan oleh Sosial Demokrat terhadap para pengungsi tidak menguntungkan terhadap masyarakat asli Denmark itu sendiri. Kebijakan Sosial Demokrat yang ramah terhadap pengungsi, dinilai oleh DPP membuat perekonomian Denmark semakin menurun. DPP yang mempunyai kekuatan dalam parlemen di Denmark, sangat berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan-kebijakan di Denmark. Lars Lokke Ramussen yang berasal dari partai Venstre dalam pemilihan umum di Denmark tahun 2015 mengatakan bahwa, kebijakan Helle Thorning Schmidt Perdana Menteri Denmark pada tahun 2011 membuat perekonomian Denmark mengalami kemerosotan (VOA, 2015). Hal ini kemudian yang menjadikan kenaikan suara di dapatkan oleh koalisi sayap kanan dan menjadikan Lars Lokke Ramussen sebagai Perdana Menteri Denmark.

Denzau & North (1994, dalam Jost, 2009: 309) menjelaskan bahwa ideologi politik ini sendiri juga memiliki beberapa fungsi yang ditujukan untuk membantu membuat kebijakan luar negeri. Fungsi-fungsinya meliputi memberikan standar untuk memperjelas suatu kebijakan, menyajikan arah solusi dari masalah politik suatu negara, menyajikan fungsi orientasi yang mana menyajikan seseorang atau sekelompok orang arah ke depan serta perasaan identitas, serta menyajikan program politik. Secara spesifik, ideologi politik menyajikan jawaban untuk memperbaiki kondisi ekonomi, tensi sosial domestik, sampai pada pendekatan terhadap ancaman keamanan nasional (Calin, 2010: 46-47). Dalam hal ini DPP menyajikan kebijakan dalam memperketat masuknya pengungsi ke

Denmark. Hal ini dianggap sebagai salah satu solusi dalam menangani isu-isu pengungsi yang melanda Eropa, serta dapat mempertahankan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat asli Denmark. Hak-hak ini meliputi konsep *cradle-to-grave* yang secara penuh seharusnya didapatkan oleh masyarakat Denmark, akan tetapi mengalami penurunan dengan kebijakan Sosial Demokrat yang lebih ramah terhadap pengungsi (Rachlin, 2010). DPP melihat penurunan ini sebagai salah satu pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat asli Denmark. Hal ini tidak terlepas dari pernyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin DPP yaitu Kristian Thulesen Dhal, mengatakan bahwa DPP ingin mensejahterakan dan juga menciptakan kebebasan bagi masyarakat asli Denmark di negaranya sendiri (*danskfolkeparti*, 2002). Maka dari itu DPP ingin memperlihatkan bahwa tujuan politik mereka merupakan hal yang ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat asli Denmark itu sendiri. Sedangkan Sosial Demokrat yang lebih berpihak terhadap pengungsi dipandang oleh DPP sebagai salah satu langkah yang salah karena tidak mengutamakan masyarakat asli dari negara Denmark. Berbagai kebudayaan yang akan masuk ke Denmark juga tidak dapat dihindarkan dengan adanya pengungsi yang masuk. Kristian Thulusen Dahl menunjukkan fokus dari tujuan DPP ingin negara Denmark harus mempertahankan budaya asli Denmark, karena hal itu merupakan salah satu warisan yang harus dilestarikan (*danskfolkeparti*, 2002). Dengan kata lain maka Denmark sama sekali tidak menginginkan terjadinya asimilasi terhadap budaya mereka.

Dalam ideologi politik sendiri terdapat beberapa varian ideologi yang mendasari terbentuknya pengaktualisasian kebijakan dari pejabat eksekutif maupun legislatif, salah satunya ialah populisme. Sebagai ideologi politik, Freedon et al (2013) menyatakan bahwa populisme dapat dikategorikan sebagai ideologi yang menempatkan masyarakat dalam kubu

homogen yang saling antagonis yakni masyarakat melawan elitis yang korup. Populisme sendiri dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara terutama dalam isu imigrasi dan ekspansi ekonomi. Partai sayap kanan yang diketuai oleh DPP mengindikasikan bahwa mereka tidak ingin Denmark menerima pengungsi, terutama yang berasal dari Timur Tengah dan beragama Muslim. Hal ini menjadikan faktor utama bagi DPP untuk menentukan arah kebijakan politik di Denmark terutama dalam hal penerimaan pengungsi. Faktor pendukung lainnya adalah ketika DPP berhasil mendominasi kursi di parlemen Denmark (Nardelli&Arnett, 2015). Dominasi inilah yang menjadikan DPP menjadi partai yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan di Denmark. Keberpihakan Denmark dalam hal kesejahteraan masyarakat asli Denmark tidak bisa dipisahkan dari ideologi politik DPP yaitu *danish nasionalis*. Proposal Sorensen dalam menanggapi isu pengungsi ini didasarkan untuk memberikan kejelasan pada arah suatu kebijakan yang akan diambil (*thelocal*, 2016). Hal ini mengindikasikan bahwa tokoh-tokoh populisme di Denmark tidak ingin adanya pengungsi terutama yang berlatar belakang muslim masuk ke Denmark.

Hal ini dilatar belakangi dari salah satu dari beberapa tipe ideologi populisme yaitu populisme *xenophobic* (Freedon et al, 2013). Dalam hal ini populisme *xenophobic* bersumber pada ketakutan terhadap kehadiran orang baru dan memposisikan elit sebagai mereka yang bertindak korup dengan membiarkan masuknya orang-orang baru ke suatu negara tersebut. Sosial Demokrat merupakan lawan yang dimaksud oleh DPP yang dianggap sebagai elit korup, dikarenakan kebijakan Sosial Demokrat dalam menerima pengungsi. DPP melihat bahwa tokoh-tokoh dari Sosial Demokrat memberikat ancaman bagi pekerja lokal untuk mendapatkan kerja. Ketika pengungsi masuk maka otomatis mereka juga akan mengajukan aplikasi pencari suaka agar dapat mendapatkan kerja dan

hidup di Denmark. DPP memandang hal ini sebagai kebijakan yang tidak berpihak pada masrakat asli Denmark. Selain faktor lapangan pekerjaan, DPP juga mengkhawatirkan jika pengungsi masuk dan tak terkendali maka akan berimplikasi terhadap mata uang asli Denmark. Faktor-faktor ini dianggap oleh DPP telah merugikan masyarakat Denmark, sehingga kebijakan-kebijakan Sosial Demokrat dalam penerimaan pengungsi kurang tepat dan tidak berpihak pada masyarakat asli di Denmark. Implikasinya terbentuknya sala satu kebijakan yang dibuat oleh koalisi sayap kanan untuk membuat para pengungsi yang akan mengajukan aplikasi pencari suaka di Denmark menjadi berkurang. Salah satunya ialah dengan cara isolasi sosial karena faktor ini merupakan hal yang penting, selain memisahkan juga dapat membuat para pencari suaka menjadi lesu karena adanya perbedaan antara negara host dan pendatang. Sehingga para pengungsi ditempatkan pada Trampoline House yang merupakan camp-camp diperuntukkan untuk para pencari suaka yang datang ke Denmark, ketua Trampoline House yaitu Morten Goll (dalam dw.com, 2015) mengatakan bahwa tujuan dari para pengungsi mengajukan aplikasi pencari suaka ke Denmark ialah untuk mencari kesejahteraan yang tidak bisa mereka dapatkan di negara asal. Pengimplikasian kebijakan isolasi sosial ini kemudian memperlihatkan bahwa Denmark ingin meretriksi para pengungsi yang akan mengajukan aplikasi pencari suaka ke Denmark.

DISKURSUS NASIONALISME DENMARK

DPP sebagai partai sayap kanan di Denmark, yang berlatarkan anti-pengungsi tidak terlepas dari ideologi dasar DPP itu sendiri yaitu danish nasionalis. Dalam hal ini DPP sangat ingin menciptakan kesejahteraan masyarakat asli Denmark, daripada memikirkan pengungsi yang akan masuk ke Denmark. Bahkan DPP ingin mengesahkan kebijakan yang bersifat

merugikan pengungsi terutama yang akan mengajukan aplikasi pencari suaka ke Denmark. DPP juga menginginkan lapangan kerja yang ada di Denmark diperuntukkan sepenuhnya kepada pekerja Denmark, dan tidak untuk para pengungsi maupun pencari suaka. Hal ini tidak terlepas dari ideologi nasionalis yang dianut oleh DPP.

Dapat dilihat bahwa nasionalisme di Denmark keberadaannya dijunjung tinggi. Nasionalisme merupakan dapat dipahami sebagai suatu konsep yang terbentuk dari kebanggaan dari suatu bangsa (Gellner, dalam Anderson, 1991). Terdapat beberapa faktor yang ikut membentuk terjadinya nasionalisme itu sendiri pertama, yaitu ethnic natinalism dan civic nationalism (Wardhani 2012). Denmark yang mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi termasuk pada faktor pertama yaitu ethnic nationalism. Dalam hal ini ethnic nationalism dapat diartikan sebagai nasionalisme yang hadir ataupun terbentuk dari implikasi adanya kesamaan etnis. Masyarakat Denmark sangat menjunjung tinggi keberadaan bahasa dan budaya asli Denmark itu sendiri, dikarenakan bahasa dan budaya merupakan identitas dari suatu negara sehingga dapat diartikan bahasa dan budaya merupakan identitas nasional Denmark (Korsgaard, p.139). Keberadaan bahasa dan budaya yang merupakan identitas nasional Denmark telah menjadikan masyarakat asli Denmark ke arah homogenitas etnis. Pendukungan atas bahasa asli Denmark diaplikasikan pada kewajiban masyarakat Denmark untuk selalu menggunakan bahasa Danish, sehingga pemerintahan Denmark meletakkan kurikulum tentang bahasa Danish sebagai mata pelajaran yang wajib. Hal ini dikarenakan bahasa yang merupakan sebuah identitas nasional, akan membuat masyarakat asli Denmark menjadi sadar atas pentingnya rasa nasionalisme (Anderson, 1991:44).

Denmark sebagai negara yang menerima imigran pada tahun 1960, karena dipengaruhi oleh kebutuhan perusahaan atas tenaga kerja tambahan

(Riss, 2011:21). Anthony Smith nasionalisme muncul ketika masyarakat industri hadir. Nasionalisme sendiri menurutnya dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang tumbuh akibat adanya persamaan bahasa. Akan tetapi pada tahun 1980 Denmark yang parlemennya dikuasai oleh partai-partai konserfatif mulai melakukan tindakan diskriminasi terhadap para imigran. Hal ini kemudian berimplikasi terhadap isu-isu di Denmark, sehingga isu imigran menempati posisi pertama. Kebijakan proteksionis ini didasari oleh para imigran yang membawa budaya dan bahasa baru di Denmark, akan tetapi masyarakat asli Denmark menolak terjadinya asimilasi terhadap bahasa maupun budaya. Dorongan ini ikut mempengaruhi penekanan bahwa jika ingin ke Denmark ataupun juga mengajukan pengaplikasian pencari suaka harus beradaptasi terhadap bahasa dan budaya asli Denmark. Kebijakan ini juga diyakini sebagai bentuk dari salah satu pernyataan Gellner (dalam Petocs, 2009: 20) yakni a political doctrine which holds that the political and national should be congruent. Bahwa pemerintahan Denmark ingin mensejajarkan politik dengan nasionalisme sehingga harus adanya keseimbangan atas keduanya. Penerepan kebijakan proteksionis terhadap imigran yang akan masuk ke Denmark telah mengindikasikan bahwa faktor nasionalisme merupakan faktor utama dalam pembentukan suatu kebijakan luar negeri di Denmark. Salah satu budaya yang tidak bisa diikuti oleh para pengungsi ialah freedom speech, keberadaan freedom speech sendiri telah dicantumkan dalam Konstitusi Danish chapter VIII (Public Ministry, 1953). Sehingga ketidakmauan para pengungsi untuk beradaptasi dengan budaya Denmark memicu timbulnya geseka-gesekan dalam isu rasial di Denmark. Hal ini merupakan juga implikasi dari ketidak sukaan para masyarakat asli Denmark terhadap keberadaan para imigran yang masuk ke Denmark.

Masyarakat dalam nasionalisme dan populisme sama-sama dilihat

sebagai suatu kelompok yang memiliki sense of belonging terhadap suatu konsep – nasionalisme dengan konsep kebangsaannya dan populisme dengan konsep masyarakat sebagai silent majority atau bagian dari heartland (Freeden et al, 2013). Ketergabungan kedua hal ini yang lalu mendasari manifesto dari partai sayap kanan di Eropa. Karena partai sayap kanan di Eropa memiliki nilai-nilai seperti nativism dan authoritarianism (Mudde, 2007). Hal ini yang pada akhirnya memperlihatkan bahwa nasionalisme juga membuat partai sayap kanan di Eropa lebih berpihak kepada masyarakat asli ketimbang para pendatang (Robins-Early, 2015). Denmark menjadi salah satu negara yang berpengaruh di Eropa dalam hal keimigrasian dan imigran. Keberpengaruhan ini dimulai dari kritik atas kebijakan EU yang dikritik oleh Peter Kofod Poulsen seorang juru bicara urusan hukum DPP, mengatakan bahwa kebijakan EU melalui Schengen dianggap tidak bisa menangani krisis imigran di Eropa. Perdana Menteri Denmark yaitu Lars Lokke Ramussen akhirnya mengambil kebijakan untuk lebih memperketat penjagaan di perbatasan. Kebijakan ini ditujukan agar para pengungsi di Denmark yang akan mengajukan aplikasi pencari suaka sesuai dengan kriteria yaitu dapat beradaptasi dengan budaya asli di Denmark (Levring, 2016). Implikasinya yaitu, hanya pengungsi dengan kriteria yang telah di tentukan oleh Denmark saja dapat masuk ke Denmark. Kebijakan Denmark ini yang akhirnya memicu diadakannya pertemuan oleh Komisi khusus Uni Eropa bidang migrasi, Dimitris Avramopoulos dengan Jerman, Denmark dan Swedia (Levring, 2016). Akan tetapi pertemuan ini hanya menimbulkan kritik yang dilakukan oleh Denmark kepada EU serta Swedia, karena dianggap tidak menciptakan solusi atas isu krisis pengungsi di Eropa. Hal ini memperlihatkan bahwa ideologi nasionalisme yang ada dalam partai-partai populis berhaluan kanan di Eropa membuahkan kebijakan luar negeri ke arah restriksi pengungsi. Dalam diskursus Pantazapolous juga dijelaskan bahwa

hubungan keduanya bersifat reduksional sehingga ideologi populis dapat sukses dan berpengaruh terhadap sesuatu hal apabila berbentuk national-populism (Panizza, 2005: 245).

Kesimpulan

Pada akhirnya, tulisan ini memperlihatkan bahwa Denmark sebagai salah satu negara yang ikut meratifikasi konvensi 1951, merubah haluan terkait kebijakan pengungsi dikarenakan adanya pengaruh populisme dan nasionalisme dalam dinamika domestik Denmark. Pengaruh populis berasal dari partai-partai sayap kanan di Denmark. Dalam hal ini DPP selaku ketua koalisi sayap kanan di Denmark, mengindikasikan ketidakberpihakan sayap kanan terhadap para pengungsi yang masuk ke Denmark. Akan tetapi sikap koalisi sayap kanan ini mendapatkan perlawanan dari koalisi moderat-sayap kanan yang dipimpin oleh Social Democrat. Para koalisi moderat-sayap kanan bertindak berkebalikan dengan sayap kanan, mereka cenderung lebih ramah terhadap para pengungsi. Hal ini didasari oleh rasa kemanusiaan dan masih adanya upaya penjagaan konvensi pengungsi 1951 oleh Denmark. Akan tetapi DPP melihat hal yang dilakukan oleh koalisi moderat-sayap kanan dianggap tidak berpihak terhadap masyarakat asli Denmark. Implikasinya moderat-sayap kanan dituduh sebagai orang yang bertanggung jawab atas kemerosotan ekonomi Denmark pada tahun 2011 yang saat itu pemerintahannya dipegang oleh Social Democrat. Hal ini yang kemudian mendasari pengambilan kebijakan oleh Denmark untuk membentuk kebijakan

yang lebih proteksionis terhadap para pengungsi.

Faktor nasionalisme berkaitan dengan perubahan diskursus yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan ini ditunjukkan melalui penolakan masyarakat Denmark yang menolak terjadinya asimilasi pengungsi dengan masyarakat asli. Hal ini kemudian berimplikasi terhadap peraturan ataupun kriteria yang telah dibuat oleh pemerintahan Denmark, sebagai seleksi untuk para pengungsi yang akan masuk ke Denmark. Kriteria ini meliputi kewajiban untuk menggunakan bahasa Danish dalam berkomunikasi di Denmark, serta adaptasi terhadap budaya-budaya asli di Denmark. Akan tetapi membanjirnya pengungsi di Eropa, membuat isu tentang pengungsi menjadi sebuah isu yang penting. Selain itu, terlihat bahwa perbedaan budaya serta bahasa dan ketidakmampuan para pengungsi untuk beradaptasi dengan budaya asli negara singgahannya membuat terciptanya konflik rasial antara masyarakat asli dengan para pengungsi. Denmark sebagai negara yang mempunyai rasa nasionalisme yang kuat menganggap bahwa, para pengungsi yang masuk ke Denmark akan mengikis nilai-nilai nasionalisme. DPP sebagai salah satu partai sayap kanan di Denmark, menilai bahwa EU sebagai badan yang mengatur para pengungsi di Eropa dinilai gagal untuk menangani kasus membanjirnya pengungsi di Eropa. Ketidakmampuan EU untuk menangani pengungsi membuat Denmark mengambil kebijakan proteksionis terhadap para pengungsi. Sehingga nasionalisme dan juga ke homogenitas etnis di Denmark tetap terjaga.

Daftar Pustaka

- [1] Anderson, Benedict. 1991. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*
- [2] BBC News. 2015. Denmark election: A close race for the status quo, dalam [http://www.bbc.com/news/world-europe-33132172]. Diakses pada 12 Maret 2016 [online]
- [3] Calin, Costel. 2010. *Hawks versus Doves: The Influence of Political Ideology on the Foreign Policy Behavior of Democratic States*, University of Tennessee.

- [4] Dansfolkeparti. 2002. The Party Program of the Danish People's Party. Terdapat dalam [https://www.danskfolkeparti.dk/The_Party_Program_of_the_Danish_Peoples_Party]. Diakses pada 11 Juni 2016 [online].
- [5] DW. 2015. Minority Right Wing Government Takes Office in Denmark. Terdapat dalam [http://www.dw.com/en/minority-right-wing-government-takes-office-in-denmark/a-18545880]. diakses pada 10 Juni 2016 [online].
- [6] Freedden, Michael et al. 2013. The Oxford Handbook of Political Ideologies
- [7] Jost, JT et al. 2009. Political Ideology: Its Structures, Functions, and Elective Affinities. The Annual Review of Psychology
- [8] Korsgaard, Ove. 2005. The Danish Way to Establish the Nation in the Hearts of the People. Terdapat dalam J.L. Campbell, J.A. Hall, & O.K Pedersen (eds), National Identity and the Varieties of Capitalism the Danish Experience. Copenhagen: DJF Publishing, pp. 133- 158.
- [9] Lam, J. 2013. Refugee Policy and Foreign Policy: Examining Policy Linkage in Chinese Relations with North Korea, Myanmar and Vietnam, dalam [http://www.inquiriesjournal.com/articles/771/refugee-policy-and-foreign-policy-examining-policy-linkage-in-chinese-relations-with-north-korea-myanmar-and-vietnam]. Diakses pada 12 Maret 2016 [online]
- [10] Levring, Peter. 2016. Denmark Told to Snub EU Border Laws as Anti-Immigrant Dominate. Terdapat dalam [http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-05/denmark-s-border-checks-appear-in-line-with-rules-eu-says]. Diakses pada 12 Juni 2016 [online].
- [11] Nardelli, Antonio & George Arnett. 2015. Why are Anti-Immigration Parties so Strong in the Nordic States?. Terdapat dalam [https://www.theguardian.com/news/datablog/2015/jun/19/rightwing-anti-immigration-parties-nordic-countries-denmark-sweden-finland-norway]. Diakses pada 12 Juni 2016 [online].
- [12] New To Denmark. 2015. Quota Refugees, dalam [https://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/asylum/quota_refugees/quota_refugees.htm]. Diakses pada 12 Maret 2016 [online]
- [13] Panizza, Francisco. 2005. Populism and the Mirror of Democracy
- [14] Petocs, Kalman. 2009. National-populism and Slovak-Hungarian Relations in Slovakia 2006-2009
- [15] Public Ministry. 1953. Danish Constitution Chapter IV. Terdapat dalam [https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=45902#K8]. Diakses pada 11 Juli 2016 [online].
- [16] Rachlin, Natalia. 2010. Cradle-To-Grave Gets Rocky in Denmark. Terdapat dalam [http://www.nytimes.com/2010/07/16/business/global/16iht-nwdenmark.html]. Diakses pada 20 Juni 2016 [online].
- [17] Robins-Early, Nick. 2015. How the Refugee Crisis is Fueling the Rise of Europe's Right. Terdapat dalam [http://www.huffingtonpost.com/entry/europe-right-wing-refugees_us_562e9e64e4b06317990f1922]. Diakses pada 17 Agustus 2016 [online].
- [18] The Local dk. 2015. Danish publish pro pengungsi advertisement. Terdapat dalam [http://www.thelocal.dk/20150810/danish-group-publishes-pro-pengungsi-advertisement]. Diakses pada 26 Oktober 2015 [online].
- [19] The Local.dk. 2015. Denmark publishes anti-refugee ad campaign, dalam [http://www.thelocal.dk/20150907/denmarks-anti-refugee-ads-published-in-foreign-papers]. Diakses pada 12 Maret 2016 [online]
- [20] UNHCR. 2015. Denmark Supports UNHCR with USD 10.3 Million to Refugee Emergencies, dalam [http://www.unhcr-northern-europe.org/news-detail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=93&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=5c90cf0f979115ad34f5811017f3681c]. Diakses pada 12 Maret 2016 [online]
- [21] UNHCR. 2015. UNHCR Observations on the proposed amendment to the Danish Alien Legislation L.87, dalam [http://www.unhcr-northern-europe.org/fileadmin/user_upload/Documents/PDF/Denmark/UNHCR_Comments_on_Danish_law_proposal_L87_January_2016.pdf]. Diakses pada 4 Mei 2016 [online]
- [22] VOA. 2015. Koalisi Sayap Kanan Denmark Menangkan Pemilu Parlemen. Terdapat dalam [http://www.voaindonesia.com/a/koalisi-kanan-denmark-menangkan-pemilu-parlemen/2828778.html]. Diakses pada 11 Juni 2016 [online].
- [23] Wardhani, Baiq L.S. 2012. Nasionalisme, dalam Perkuliahan Pengantar Ilmu Hubungan Internasional.